

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM UPAYA UNTUK MEMASUKKAN SEGMENT TANJUNG DATU SEBAGAI OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEM INDONESIA-MALAYSIA

INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY IN THE EFFORTS TO OBTAIN TANJUNG DATU SEGMENT AS OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEM OF INDONESIA-MALAYSIA

Istiqamah¹

Prodi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia
(purnomo.istiqamah@gmail.com)

Abstrak – Tulisan ini membahas mengenai bentuk penyelenggaraan diplomasi pertahanan serta analisisnya dalam upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai *Outstanding Boundary Problem* Indonesia-Malaysia. Hal ini didasarkan atas status Tanjung Datu yang ambigu akibat perbedaan penafsiran *Memorandum of Understanding* (MOU) 1978 oleh pihak internal pemerintah Indonesia. Perundingan untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP terjadi pada tahun 2001. Usaha melobi pihak Malaysia untuk memasukkan Tanjung Datu sebagai OBP dilakukan secara intensif oleh para delegasi sampai akhirnya Indonesia menerima keputusan pihak Malaysia untuk tidak lagi mempermasalahkan Tanjung Datu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan enam informan yang meliputi praktisi dan pakar di bidang terkait. Data juga diperoleh dari berbagai literatur. Temuan studi ini berupa subjek diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia yaitu Pankorwilnas, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan JUPEM. Sedangkan objek diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia adalah berupa tujuan Indonesia yakni sebagai implementasi kepentingan nasional dalam meraih kedaulatan teritorialnya serta hal itu termasuk dalam lingkup pertahanan.

Kata Kunci : diplomasi pertahanan, teori pembentukan perbatasan darat, kedaulatan teritorial, segmen tanjung datu, *outstanding boundary problems*

Abstract – *This study discusses on implementation of Indonesia's defense diplomacy and its analysis in effort to obtain Tanjung Datu segment as Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. This is based on the status of Tanjung Datu as Outstanding Boundary Problem was ambiguous due the different interpretations of Memorandum of Understanding (MOU) 1976 and 1978 by Government of Indonesia. The negotiation to obtain Tanjung Datu segment as Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia in 2001. Indonesia attempt to lobby Malaysian to attach Tanjung Datu as OBP and its intensively conducted by Indonesian delegates until finally, Indonesia accepted Malaysia's decision that Tanjung Datu is not part of the OBP. The research method was qualitative approach in which data collection technique was conducted through interviews with six informants including practitioners and experts in related fields. This study showed that the subjects of Indonesian defense diplomacy in efforts to obtain Tanjung Datu segment as OBP Indonesia-Malaysia are Pankorwilnas, Directorate of Army Topography, Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs and JUPEM. While the object of Indonesian defense diplomacy in the efforts to obtain Tanjung Datu segment as OBP Indonesia-Malaysia are the implementation of Indonesian national interest to achieve territorial sovereignty and it was also part of defense.*

Keywords: *defense diplomacy, bounday making theory, territorial sovereignty, tanjung datu segment, outstanding boundary problems*

¹ Penulis adalah mahasiswa program studi Diplomasi Pertahanan Cohort 2 Universitas Pertahanan dan alumni Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014.

Pendahuluan

Kajian mengenai segmen Tanjung Datu dimulai dari penentuan perbatasan darat oleh Indonesia-Malaysia merujuk pada prinsip *uti possidetis juris*, dimana Indonesia mewarisi wilayah Belanda dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Penentuan perbatasan darat tersebut mengacu pada perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Inggris, yakni :

“Treaty Between the Netherland Government and the British Government Defining the Boundaries Between the Two Countries in the Island of the Borneo, 20 Juni 1891, Agreement of the Joint Report Concerning the Implementation at Field of the Treaty of 1891 between Netherland Possesion and British Protection in the Island of Borneo, 28 September 1915 dan Treaty Between the Netherland Government and the British Government Defining the Boundaries Between the Two Countries in the Island of Borneo, 26 Maret 1928.”

Menurut Direktorat Topografi Angkatan Darat, proses demarkasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan sejak tahun 1973 hingga pada tahun 2000 dan menghasilkan tugu batas sebanyak 20.311 pilar. Namun, proses demarkasi belum berjalan lancar karena menyisakan beberapa titik bermasalah yang disebut *Outstanding Boundary Problems* (OBP). Indonesia pernah mengajukan sepuluh *outstanding boundary problems* yang terletak masing-masing lima tempat di

dua sektor, sektor timur (Kalimantan Timur-Sabah) yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600, sedangkan sektor barat (Kalimantan Barat-Serawak) yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, titik D.400 di Kabupaten Bengkayang dan Tanjung Datu. Akan tetapi, Malaysia memiliki perbedaan pendapat terkait jumlah OBP. Bagi Malaysia, Tanjung Datu tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari OBP karena permasalahannya telah selesai. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Indonesia ini didasari oleh penafsiran metode penentuan perbatasan yang terjadi pada tahun 1976 dan 1978.

Permasalahan ini mencuat pertama kali pada paparan Laporan Pembahasan Kelompok Kerja tentang Masalah Penegasan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia pada tanggal 14 Mei 1983. Hal ini mengenai ketidaksesuaian dalam penegasan batas. Akan tetapi, permasalahan ketidaksesuaian pada penegasan batas Tanjung Datu tidak pernah disampaikan secara resmi kepada Malaysia. Pertemuan *27 Joint Demarcation Malaysia-Indonesia Boundary Committee on Demarcation and Survei* pada 29-31 Oktober 2001, di Kota Kinabalu menjadi momentum untuk Indonesia mengajukan agar Tanjung Datu ditinjau ulang dan dijadikan sebagai salah satu OBP. Pada tanggal 10-11 April 2002, dilaksanakan *Special Meeting* antara kedua Ketua Panitia Nasional. Pada pertemuan tersebut, pihak Indonesia kembali mengajukan agar Tanjung Datu menjadi salah satu OBP, tetapi Malaysia menolak dengan alasan

² Erika, “Status Tanjung Datu Sebagai Outstanding Boundary Problem Pada Perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia”, Tesis, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2014, hlm.3.

permasalahan Tanjung Datu telah selesai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) 1978³.

Keterlibatan TNI dalam menangani permasalahan perbatasan khususnya, segmen Tanjung Datu menjadi persoalan yang menarik dalam tulisan ini. Keterlibatan tersebut terlihat dalam berbagai aspek seperti tim teknis pengukuran, melakukan penjagaan perbatasan bahkan ikut dalam merumuskan keputusan. Selain itu, permasalahan perbatasan menjadi salah satu isu strategis objek pertahanan negara. Pertahanan negara berarti segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata⁴. Menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara menjadi tonggak dasar bahwa sejangkal tanah NKRI harus diperjuangkan dan ini menjadi dasar adanya proses diplomasi pertahanan saat memasukkan agenda segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001-2002.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, rumusan permasalahan utama dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai *Outstanding Boundary Problems* Indonesia-Malaysia?

³ *Ibid*, hlm. 7.

⁴ Makmur Supriyatno, *Pendirian Batas Darat Internasional antara Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan*, (Jakarta: CV Makmur Cahaya Ilmu, 2016), hlm. 99.

Periode waktu yang diambil adalah pasca MOU 1978 ditandatangani hingga puncaknya, pada saat perundingan *The Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* dan *Special Meeting* pada tahun 2001-2002. Rentang waktu ini dipilih karena pada masa itu terjadi usaha memasukkan agenda Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia.

Metode Penulisan

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *in depth interview* dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman terdiri dari tiga tahapan, yakni *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Reduksi data berarti merangkum, memilah poin-poin penting sehingga memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah direduksi, data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain-lain. Tahap terakhir adalah menyimpulkan semua hasil yang telah dilakukan sebelumnya sehingga akan terlihat temuan baru dalam penulisan⁵.

⁵ P.D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif – Kualitatif dan R&D*, (Jakarta : Alfabeta, 2012).

Hasil Penulisan dan Pembahasan Diplomasi Indonesia dalam Upaya untuk Memasukkan Segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia

Indonesia tidak pernah menyampaikan secara resmi mengenai permasalahan segmen Tanjung Datu setelah ditandatanganinya MOU 1978. Pembicaraan mengenai segmen Tanjung Datu hanya dibahas secara internal melalui Laporan Hasil Pembahasan Kelompok Kerja tentang Masalah Penegasan Perbatasan Indonesia dan Malaysia tanggal 14 Mei 1983. Menurut Brigjen TNI Makmur Supriyatno, pertemuan tahunan *Joint Border Committee* ataupun *General Border Committee* juga tidak pernah membahas mengenai segmen Tanjung Datu dan itu terbukti dengan tidak ada catatan di setiap *Minute of Meeting of Joint Border Committee*⁶.

Brigjen TNI Makmur Supriyatno selaku aktor yang pertama kali mengangkat segmen Tanjung Datu beranggapan bahwa segmen Tanjung Datu perlu diangkat karena teknis pengukuran yang tidak sesuai. Maka di tahun 2001, permasalahan segmen Tanjung Datu dibahas secara resmi pada pertemuan *The Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* ke-27 tanggal 29-31 Oktober 2001 di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh DR. Ir. Siti Nurbaya, MSc. selaku Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Indonesia dan Ketua Panitia Nasional Indonesia Perbatasan Indonesia-Malaysia. Sedangkan, delegasi Malaysia dipimpin

⁶ Erika, *Op.Cit*, hal. 52

oleh Datuk Dr. Nik Mohd. Zain bin Hj. Nik Yusuf selaku *Secretary General Ministry of Land and Co-operative Development dan Malaysia Chairman National Malaysia-Indonesia Boundary Committee*.

Indonesia berupaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP, mengusulkan pihak Malaysia untuk melakukan survei ulang di wilayah Tanjung Datu. Sehingga, hasil akhir dari pihak Indonesia adalah mengajukan 10 OBP dengan 5 OBP di sektor barat yakni Batu Aum, Titik D400, Gunung Jagoi, Gunung Raya (beserta segmen Tanjung Datu) dan 5 OBP di sektor timur yaitu Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik, Titik C500-C600 dan Titik B. 2700-B. 3.100.

Malaysia menanggapi usulan Indonesia dengan beranggapan bahwa Malaysia hanya menyepakati 9 OBP dan merasa bahwa permasalahan segmen Tanjung Datu telah selesai dengan ditandatanganinya MOU Demarkasi pada pertemuan *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on Survei and Demarcation of International Boundaries Between Indonesia-Malaysia* tahun 1978. Namun, pihak Indonesia bersikeras meminta agar permasalahan segmen Tanjung Datu tetap dibahas di dalam pertemuan yang akan datang karena adanya masalah teknis. Malaysia menerima dengan syarat Indonesia membuat *technical note* dan menyampaikan argumentasi mengenai segmen Tanjung Datu⁷.

⁷ Makmur Supriyatno, "Masalah Perbatasan Darat Internasional antara Republik Indonesia-Malaysia

Setelah pertemuan tersebut, dilakukan penulisan atas rekomendasi saran Direktorat Topografi TNI AD dan perintah Menteri Dalam Negeri dhi. Sekjen Departemen Dalam Negeri secara sepihak oleh Tim Indonesia terhadap segmen Tanjung Datu. Penulisan itu bertujuan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam pertemuan *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* (JIM) yang diadakan pada tahun 2002. Penulisan tersebut menggunakan metode pemotretan udara (*aerial photography*), interpretasi foto udara dengan cara manual dan digital, pengamatan medan, pengukuran detail, penggunaan *Global Positioning System* (GPS) *Geodetics*, penghitungan terhadap penampang pada *Field Plan* dan *Traverse & Height* dan pengukuran lapangan. Keseluruhan data dan informasi kemudian dianalisis oleh Indonesia sehingga mendapatkan bukti baru (*novum*) yakni permukaan tanah pada segmen Tanjung Datu secara geomorfologis datar, tidak ditemukannya *watershed* sehingga teknis pengukurannya harus menggunakan teknis pengukuran garis lurus (*straight line boundary*) dan bukan *waterpass*. Berdasarkan hasil penulisan itu dimana pengukuran yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum pada Traktat 1891⁸.

di Daerah Tanjung Datu Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat”, Forum Diskusi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 2009.

⁸ Makmur Supriyatno, “Informasi tentang Permasalahan Teknis OBP Garis Batas Internasional antara RI-Malaysia di Tanjung Datu (Camar Bulan)”, Forum Diskusi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 2009.

Pada tanggal 10-11 April 2002 diadakan pertemuan antara Joint Border Committee Indonesia-Malaysia di Jakarta, yakni *The Special Meeting to Finalize the Terms of Reference for the Joint of Working Group on the Outstanding Boundary Problems on the Joint Demarcation and Survei of the International Boundary between Indonesia-Malaysia*. Agenda pertemuan itu membahas *Term of Reference* (TOR) untuk *Joint of Working Group on the Outstanding Boundary Problems*. Delegasi Indonesia kembali dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri pada masa itu, DR. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. dan Delegasi Malaysia dipimpin oleh Datuk Dr. Nik Mohd. Zain bin Hj. Nik Yusuf.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia memaparkan hasil penulisan yang dilakukan sebelumnya mengenai daerah Tanjung Datu secara morfologis adalah daerah dataran yang harus diukur menggunakan teknis *straight line boundary* serta daerah Tanjung Datu yang diukur pada tahun 1975 dan 1976 menggunakan teknis pengukuran *water pass* atau *leveling*. Pihak Malaysia merespon sudut pandang Indonesia dengan menyampaikan bahwa Malaysia menerima argumentasi bahwa segmen Tanjung Datu tidak ada *watershed* atau datar, Malaysia tidak bersedia memasukkan ‘penerimaan argumentasi’ tersebut secara tertulis yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ‘*Record of Meeting*’, Malaysia mempermasalahkan mengapa Indonesia menandatangani MOU pada tahun 1976 dan 1978, setelah

dua tahun hasil pengukuran dilaksanakan, Malaysia merasa sulit untuk mencabut MOU yang sudah ditandatangani di sistem pemerintahan Malaysia dan Malaysia tidak setuju untuk memasukkan Tanjung Datu ke dalam TOR OBP⁹.

Berdasarkan *Record of Meeting*, tercatat hasil pertemuan dengan kesepakatan berupa Malaysia menyerahkan TOR JWG OBP dengan sembilan (9) permasalahan utama perbatasan (OBP), Indonesia menyerahkan TOR JWG OBP dengan 10 permasalahan utama perbatasan (OBP), Indonesia menyatakan bahwa Tanjung Datu merupakan salah satu OBP karena terdapat permasalahan teknis yang dapat dikategorikan sebagai sama dengan OBP lainnya, Indonesia menyatakan bahwa Tanjung Datu merupakan salah satu OBP yang harus dibahas pada JWG OBP, Malaysia menyatakan bahwa Tanjung Datu bukan merupakan OBP, Malaysia menyatakan permasalahan Tanjung Datu sudah selesai dengan ditandatanganinya MOU pada tanggal 23 Agustus 1976 dan 18 November 1978, para pihak menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi tentang kasus Tanjung Datu serta tidak menemukan kesepakatan dalam TOR dan Malaysia menyetujui untuk bertemu kembali pada Juli 2002¹⁰.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Analisis Penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Upaya Memasukkan Segmen Tanjung Datu sebagai *Outstanding Boundary Problems* Indonesia-Malaysia

Berdasarkan beberapa definisi, penulis berpandangan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur yang terkait dengan pertahanan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan luar negeri atau kepentingan pertahanan dalam lingkup nasional suatu negara. Pemanfaatan instrumen militer ini dapat melalui forum dialog, adanya penulisan mengenai penetapan status Tanjung Datu, merumuskan bentuk kerja sama, melakukan suatu latihan gabungan ataupun turut mewujudkan perdamaian dengan cara terlibat dalam pencegahan konflik. Diplomasi pertahanan tidak hanya bergerak dalam perspektif pertahanan ataupun keamanan tetapi dapat berkiprah di bidang kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik bahkan lingkungan karena tren ancaman suatu negara saat ini sangatlah dinamis.

Selain itu, diplomasi pertahanan tidak dapat hanya dibatasi dari perspektif subjek saja dimana diplomasi pertahanan sama dengan diplomasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. Apabila kita juga melihat diplomasi pertahanan dari perspektif objek yakni tujuan dilakukannya diplomasi, maka pengaplikasian diplomasi pertahanan akan sangat luas dan bermanfaat untuk kepentingan nasional atas nama pertahanan negara.

Cara pandang penulis tidak terlepas dari pemahaman penulis mengenai asumsi Du Plessis¹¹ terhadap diplomasi pertahanan yakni penggunaan angkatan bersenjata yang telah terlatih untuk mencapai kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional, serta Muthanna¹² yang menyatakan bahwa semua komponen yang terkait dengan pertahanan (tidak hanya angkatan bersenjata) seperti Kementerian, lembaga penulisan dan pengembangan serta Universitas dapat menjalankan aktivitas diplomasi pertahanan.

Selain itu, penulis juga menafsirkan pandangan Rodon Pedrason¹³ mengenai diplomasi pertahanan yang menggunakan semua jenis instrumen, dan dalam kasus ini, penulis melihat penyelenggaraan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia, menggunakan instrumen politik dalam menjalankan diplomasi pertahanan untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai *Outstanding Boundary Problem* Indonesia-Malaysia.

Lebih jelasnya, penulis membagi analisis mengenai penyelenggaraan diplomasi pertahanan dalam upaya mengangkat segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia menjadi dua perspektif, yakni subjek dan objek.

¹¹ Antonio Du Plessis, "Defence Diplomacy : Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa", 2008.

¹² KA Muthanna, "Military Diplomacy", *Journal of Defence Studies*, Vol. 5, No. 1, Januari 2011.

¹³ Rodon Pedrason, " Introduction to Module Defence Diplomacy", *Diplomasi Pertahanan*, Universitas Pertahanan Indonesia. Sentul, 2016.

Diplomasi Pertahanan Memandang Agenda Upaya Pengangkatan Segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia dari Perspektif Subjek

Subjek atau aktor yang memiliki peran utama dalam diplomasi pertahanan adalah Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, serta petugas sipil yang berkerja di sektor pertahanan. Namun dikarenakan dekatnya hubungan antara pertahanan dan kebijakan luar negeri, peran diplomat juga diperhitungkan dalam diplomasi pertahanan¹⁴.

Perkembangan sistem internasional mengakibatkan meluasnya juga aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi pertahanan. Saat ini diplomasi pertahanan dapat melalui *Track-1 channel* dan *Track-2 channel*. *Track-1 channel* merupakan jaringan para pejabat selevel menteri, anggota parlemen, militer dan petugas kepolisian. Sedangkan *Track-2 channel* adalah jaringan para pengambil keputusan dan masyarakat sipil¹⁵.

Dalam agenda upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia, peran kelembagaan sangat besar, yakni Panitia Koordinasi Wilayah Nasional (Pankorwilnas) dan organisasi seperti *The Joint Boundary Committee*. Selain itu, institusi pemerintahan Indonesia seperti Direktorat Topografi AD, Kementerian Pertahanan

¹⁴ A.R. Silva, "Defense Diplomacy: What are we talking about?" *Encontro Nacional da ABRI*, 2015), hlm.1-9.

¹⁵ Iis Gindarsah, "Indonesia's Defence Diplomacy Harnessing The Hedging Strategy Against Regional Uncertainties" *RSIS Working Paper*, 2015, hlm. 1-9.

dan Kementerian Dalam Negeri memiliki tugasnya masing-masing yang intinya bermuara untuk mengupayakan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001-2002 serta JUPEM sebagai lembaga resmi negara Malaysia juga memiliki peran yang sangat besar saat menjadi delegasi perwakilan Malaysia saat perundingan itu.

a. Panitia Koordinasi Wilayah Nasional (Pankorwilnas)

Panitia Koordinasi Wilayah Nasional (Pankorwilnas) adalah suatu kepanitiaan yang menangani permasalahan batas pada masa Orde Baru dan dibentuk pada tanggal 4 Juni 1971 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1971. Pendirian Pankorwilnas berdasarkan pertimbangan bahwa diperlukannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelesaian masalah wilayah nasional dan dasar laut serta bertujuan agar segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian masalah wilayah nasional dan dasar laut dapat berlandaskan kebijaksanaan pemerintah secara menyeluruh. Pankorwilnas juga memiliki tugas seperti merumuskan pokok-pokok kebijakan yang menyangkut penyelesaian masalah-masalah wilayah nasional dan dasar laut dan mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah wilayah nasional dan dasar laut dengan negara-negara tetangga.¹⁶

Laporan Pankorwilnas selalu menjadi rujukan sekaligus dasar

dalam penyelesaian permasalahan perbatasan. Salah satu laporan dari Sub Panitia Penyelesaian Masalah Batas-Batas Wilayah Nasional dan Dasar Laut Republik Indonesia pada tahun 1983 mengenai Hasil Pembahasan Kelompok Kerja Masalah Penegasan Perbatasan Indonesia-Malaysia membahas tentang permasalahan perbatasan darat yang saat itu belum dinamai OBP¹⁷, termasuk tentang pengukuran segmen Tanjung Datu yang dianggap merugikan pihak Indonesia.

Keberadaan Pankorwilnas menjadi subjek sentral dalam diplomasi pertahanan dimana lembaga yang berdiri pada masa Orde Baru tersebut memang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan serta memiliki anggota-anggota militer yang mumpuni dalam permasalahan perbatasan.

Pankorwilnas juga berperan besar dalam membentuk lembaga bilateral Indonesia-Malaysia yang berfungsi untuk menyelesaikan dan menegaskan batas dan survei perbatasan wilayah kedua negara. Lembaga ini masih berjalan hingga sekarang dan didahului dengan MOU Tahun 1973 yang mengamanatkan pembentukan komisi harus dibentuk oleh Indonesia-Malaysia. Lembaga ini bernama Panitia Nasional dan Panitia Teknis.

Panitia Nasional pada periode 1973-1983, diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan setelah tahun 1998, diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam

¹⁶ Makmur Supriyatno, *op.cit*, 2016.

¹⁷ *Ibid*.

Negeri. Panitia Nasional bertugas dalam penyelesaian penegasan batas dan survei bersama perbatasan wilayah. Sedangkan Panitia Teknis pada periode 1973-1983 diketuai oleh Kepala Bakosurtanal, periode 1983-2009 diketuai oleh Kapussurta ABRI. Saat ini, Panitia Teknis dipimpin oleh Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan. Panitia Teknis berfungsi menyiapkan program dan pelaksanaan survei serta penegasan bersama juga menyiapkan laporan kemajuan hasil yang dicapai atau masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan survei kepada Panitia Nasional¹⁸.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1996 tentang pembentukan Dewan Kelautan Nasional untuk menangani masalah-masalah kelautan, yang didasari oleh berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982, maka Pankorwilnas dinyatakan tidak berlaku lagi. Bubarnya Pankorwilnas berdampak pada transformasi struktur organisasi penanganan permasalahan perbatasan. Saat ini, pimpinan tertinggi organisasi penanganan permasalahan perbatasan dipegang oleh Panitia Nasional, yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pembubaran Pankorwilnas pada tahun 1982 menjadi suatu kerugian tersendiri bagi Indonesia karena Indonesia tidak lagi memiliki lembaga yang fokus menangani permasalahan perbatasan khususnya permasalahan perbatasan

¹⁸ Erika, *op.cit*, dan Makmur Supriyatno, 2016, *op.cit*

darat. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, bubarnya Pankorwilnas tidak menyurutkan keinginan TNI AD untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan darat. Ini dibuktikan dengan berjalannya diplomasi mengenai permasalahan segmen Tanjung Datu yang selama ini memiliki status ambigu.

b. Direktorat Topografi Angkatan Darat

Direktorat Topografi Angkatan Darat bertugas menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi geografi atau medan dalam bentuk peta topografi, data dan analisa medan serta produk topografi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Angkatan Darat.

Direktorat Topografi Angkatan Darat berada di bawah kedudukan Kementerian Pertahanan dan menjadi bagian dari perundingan agenda upaya pemasukan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia dengan terjun langsung melakukan pengukuran di perbatasan Kalimantan-Sarawak dan Sabah, termasuk segmen Tanjung Datu. Dalam struktur organisasi yang telah digambarkan sebelumnya, Direktorat Topografi AD menjabat *Co-Project Director* Sektor Barat dan *Co-Project Director* Sektor Timur.

Keahlian dalam pengukuran, pemetaan, dan survei yang dimiliki oleh Direktorat Topografi AD menjadikan mereka dipercaya untuk dilibatkan sebagai delegasi perundingan perbatasan, dan

memberikan pertimbangan mengenai perbatasan dari aspek teknis.

Dalam perundingan mengenai perbatasan pada tahun 1976-1978, Direktorat Topografi AD bekerja sebagai pelaksana survei dan penentuan batas di bawah tanggung jawab Bakosurtanal. Sedangkan, pada perundingan mengenai agenda pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia tahun 2001-2002, Direktorat Topografi AD terlibat dalam penulisannya di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri.

c. Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab pada Presiden. Kementerian Pertahanan memiliki tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertahanan dalam pemerintahan, yang bertujuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pertahanan adalah aktor utama dalam diplomasi pertahanan. Dalam agenda upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia, Kementerian Pertahanan turut menjadi delegasi saat perundingan dimana Kementerian Pertahanan menjabat sebagai Panitia Teknis.

d. Kementerian Dalam Negeri

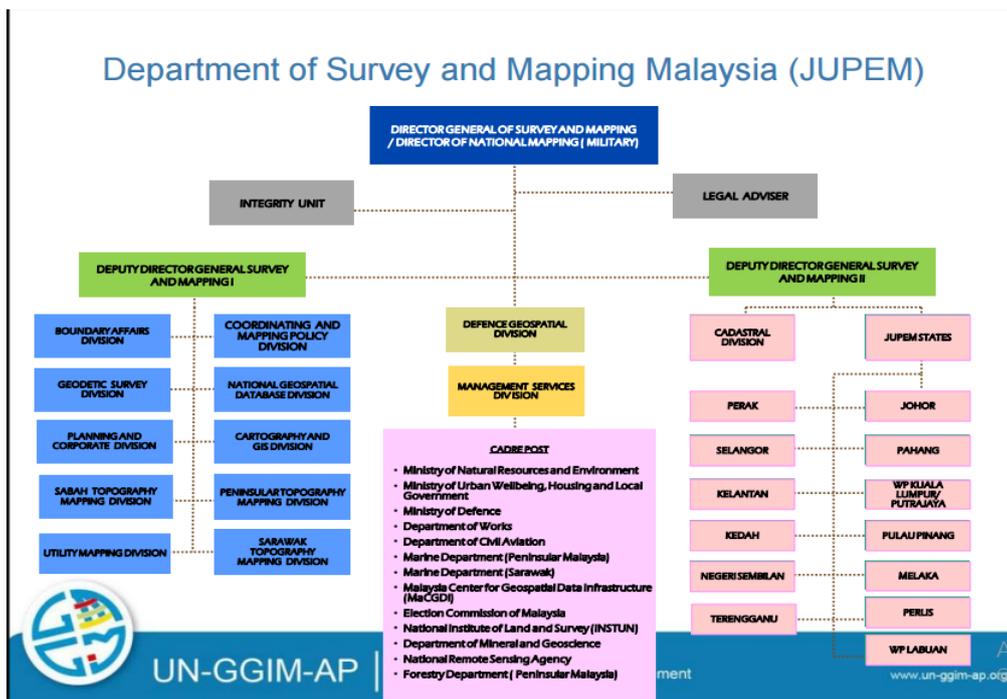
Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam perundingan perbatasan, Ketua Delegasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dimana juga menjabat sebagai Panitia Nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pada era Siti Nurbaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, agenda pengangkatan segmen Tanjung Datu diupayakan untuk dirundingkan dengan pihak Malaysia melalui perundingan JIM-27 pada tahun 2001. Saat Malaysia meminta pihak Indonesia untuk membuat *technical note* tentang argumentasi masalah segmen Tanjung Datu, Siti Nurbaya memerintahkan untuk dilakukan penulisan kembali mengenai segmen Tanjung Datu, yang kemudian menghasilkan bukti bahwa segmen Tanjung Datu datar. Meskipun begitu, pihak Malaysia tidak berkeinginan untuk mempertimbangkan asumsi tersebut sebagai dasar diajukan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia karena pihak Indonesia-Malaysia telah menandatangani MOU pada tahun 1978.

Struktur organisasi JUPEM dapat digambarkan seperti di bawah ini :



e. JUPEM

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia atau yang sering disingkat JUPEM adalah lembaga negara Malaysia yang bertugas dalam melakukan pengukuran dan pemetaan dan mendapatkan mandat untuk mengendalikan kerja ukur, pemetaan, topografi dan geodesi. JUPEM menjadi perwakilan delegasi negara Malaysia saat melakukan perundingan perbatasan.

JUPEM memiliki divisi militer yang bernama *Defense Geospatial Division* yang juga terlibat dalam perundingan agenda pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia. Menurut Brigjen TNI Makmur Supriyatno, terdapat satu orang delegasi perwakilan *Defense Geospatial Division* yang hadir saat perundingan tersebut. Dengan kata lain, subjek diplomasi pertahanan

telah terjadi dengan adanya keterlibatan perwakilan militer antar negara Indonesia dan Malaysia saat perundingan agenda pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia tahun 2001 dan 2002.

Diplomasi Pertahanan Memandang Agenda Upaya Pengangkatan Segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia dari Perspektif Objek

Dalam artian sempit, diplomasi pertahanan dapat didefinisikan sebagai “penggunaan personel militer, termasuk petugas atase, yang membantu dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, pengembangan angkatan bersenjata yang demokratis”. Definisi ini memiliki relasi dengan pengertian yang terdapat dalam *Strategic Defense Review*

1998 – “penyediaan angkatan bersenjata untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan seperti menghilangkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu pengembangan angkatan bersenjata yang demokratis, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dan resolusi konflik”¹⁹.

Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi pertahanan dapat dideskripsikan sebagai “penggunaan angkatan bersenjata yang melakukan operasi selain perang, mengerjakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan mereka dalam rangka mencapai kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri suatu negara”. Lebih rincinya, pengertian ini mirip dengan penafsiran diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster yakni “penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur yang terkait dengan Kementerian Pertahanan pada masa damai sebagai alat kebijakan keamanan dan luar negeri”²⁰.

Pada era kontemporer, penggunaan instrumen diplomasi pertahanan tidak hanya terkait dengan adanya kerjasama pertahanan, latihan bersama pasukan, pembangunan industri pertahanan serta pertukaran pasukan antar negara yang bertujuan membangun rasa percaya diri serta pencegahan konflik. Dalam sudut pandang *hard core*, diplomasi pertahanan dapat diaplikasikan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara

¹⁹ Antonio du Plessis, *op. cit.*

²⁰ *Ibid.*

demikian terwujudnya perdamaian di sistem internasional.

Republik Indonesia memiliki tujuan nasional yang nantinya akan mencerminkan kepentingan nasionalnya. Hal itu tertuang dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut apabila dipersempit akan menghasilkan kepentingan nasional berupa keamanan, ekonomi dan kesejahteraan.

Kedaulatan teritori menjadi salah satu aspek dari dimensi keamanan, karena suatu negara akan dapat menjamin rasa aman para penduduknya di suatu wilayah yurisdiksi kewenangannya. Menurut Panglima TNI Republik Indonesia Periode 2010-2013, Laksamana Agus Suhartono, kepastian hukum tentang kedaulatan negara yang pada gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah NKRI. Kejelasan batas wilayah perbatasan juga akan mempermudah pengelolaan wilayah perbatasan karena menjamin adanya pengawasan, pengamanan, penegakan hukum serta perlindungan wilayah NKRI oleh aparat pertahanan negara atau aparat penegak hukum nasional²¹. Negara

²¹ Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*, dalam http://bnpp.go.id/document/produk_hukum/2015/perkaban/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahun_2015.pdf.

Indonesia masih memiliki berbagai macam persoalan yang belum selesai mengenai kejelasan status wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara-negara lain yang berdampak pada penduduk yang menempati wilayah tersebut memiliki keterbatasan dalam menikmati hak yang diberikan oleh negara tersebut sehingga terkadang mereka harus hidup di bawah garis kesejahteraan.

Agenda upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada pertemuan JIM tahun 2001 dan *Special Meeting* tahun 2002 bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara Indonesia yakni kedaulatan wilayah NKRI. Pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia oleh pihak Indonesia pada saat itu didasari landasan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih wilayah sebesar 1499 HA karena hasil penulisan yang memperlihatkan bahwa segmen Tanjung Datu datar dan terjadi kesalahan metode pengukuran yang dilakukan pada tahun 1975-1978. Akan tetapi, Indonesia harus menerima kenyataan kalau pihak Malaysia tidak memiliki keinginan untuk merundingkan segmen Tanjung Datu kembali karena Indonesia dan Malaysia telah sepakat terhadap hasil pengukuran dan menandatangani MOU Tahun 1978 .

Berkaca pada dimensi pertahanan, kedaulatan teritori selalu menjadi bagian dari objek pertahanan. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014,

yang salah satunya menyatakan bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpotensi mendapat ancaman²². Selain itu, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah menjabarkannya dalam pasal 1 yakni :

- a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sebuah kemutlakan bahwa perundingan perbatasan selalu menjadi lingkup pertahanan. Hal ini termasuk dalam agenda upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan *Special*

²² Kementerian Hukum dan HAM, *Berita Negara Republik Indonesia*, 2014, DITJENPP Kementerian Hukum dan HAM, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn403-2014.pdf>.

Meeting tahun 2002. Meskipun Ketua Delegasi Perundingan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, objek yang dirundingkan, diupayakan, didiplomasikan adalah materi, lingkup pertahanan negara. Ini dikarenakan Sistem Pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan semesta (Sishanta) dimana pertahanan dijaga oleh militer dan non militer (masyarakat sipil). Selain itu, adanya hubungan sipil militer yang sinergis mencerminkan bahwa diplomasi pertahanan telah berjalan baik di suatu negara. Hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang melihat salah satu parameter diplomasi pertahanan adalah adanya hubungan sipil militer²³.

Plessis²⁴ turut mendeskripsikan instrumen diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Afrika Selatan yakni adanya perwakilan melalui Atase Pertahanan, interaksi bilateral-multilateral seperti perjanjian dan pertemuan untuk meningkatkan tujuan kebijakan luar negeri. Selain itu, penulis telah menjelaskan aktivitas diplomasi pertahanan di bab sebelumnya yakni pemanfaatan instrumen militer ini dapat melalui forum dialog dan adanya penulisan mengenai penetapan status Tanjung Datu. Dalam perundingan agenda pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia tahun 2001 dan 2002, forum perundingan itu dapat dikategorikan sebagai interaksi bilateral antara Indonesia-Malaysia.

²³ Plessis, *Op.Cit.*

²⁴ *Ibid*

Kehadiran Atase Pertahanan Indonesia dan Malaysia dalam perundingan itu serta adanya penulisan yang dilakukan oleh pihak Indonesia untuk membuktikan bahwa segmen Tanjung Datu itu datar menjadi bukti bahwa aktivitas diplomasi pertahanan telah terjadi.

Sesuai dengan pernyataan Hans Morgenthau²⁵, “*Diplomacy is the promotion of the national interest by peaceful means*”, perundingan mengenai agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia tidak terlepas dari kepentingan nasional negara Indonesia untuk menjadikan segmen Tanjung Datu sebagai bagian dari wilayahnya. Maka dari itu, penulis meninjau bahwa perundingan mengenai agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Secara ringkasnya, diplomasi pertahanan memandang perundingan tersebut dari perspektif objek dapat digambarkan dengan bagan di bawah :

²⁵ Your Article Library, “Diplomacy: Meaning, Nature, Functions and Role in Crisis Management”, dalam <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/diplomacy-meaning-nature-functions-and-role-in-crisis-management/48491> , diakses pada 16 November 2017.



Sudut Pandang Diplomasi Pertahanan Dalam Agenda Upaya Pemasukan Segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Objek

Kesimpulan

Perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia adalah salah satu bentuk perundingan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara lain. Perbatasan negara selalu menjadi isu yang penting bagi suatu negara karena erat kaitannya dengan kedaulatan negara terhadap suatu wilayah. Kejelasan status perbatasan akan menguntungkan pemerintahnya dalam melaksanakan kedaulatan serta menyejahterakan rakyatnya.

Permasalahan *Outstanding Boundary Problems* yang tak kunjung selesai menyebabkan adanya tarik menarik kepentingan baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Permasalahan segmen Tanjung Datu hanya salah satu contoh

kecil dimana suatu negara akan selalu berusaha untuk mengupayakan berbagai cara agar dapat mencapai keinginannya, dan salah satu cara yang dianggap paling damai dan efektif adalah diplomasi.

Diplomasi adalah sebuah seni untuk memaksakan keinginan ataupun kepentingan dapat terpenuhi oleh suatu negara. Diplomasi pertahanan lahir sebagai bentuk kontemporer langkah diplomasi yang dapat mensinergikan pihak sipil dan militer agar dapat merealisasikan kepentingannya. Dalam kasus Indonesia, diplomasi pertahanan telah berjalan saat perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002.

Meninjau sudut pandang diplomasi pertahanan saat memandang perundingan

agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 dapat dilihat dari dua perspektif, yakni subjek dan objek. Sudut pandang subjek terlihat dari siapa aktor yang terlibat dalam perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 dan apa perannya saat itu. Dari pihak Indonesia, aktor yang terlibat adalah Panitia Koordinasi Wilayah Nasional (Pankorwilnas), Direktorat Topografi AD, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan dari pihak Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) adalah institusi utama negara Malaysia yang terlibat secara penuh dalam penentuan perbatasan hingga menjadi delegasi dalam perundingan perbatasan. JUPEM sendiri memiliki divisi militer yang bernama *Defense Geospatial Division* yang turut serta dalam proses perundingan.

Sedangkan, sudut pandang objek dalam memandang perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 dilihat dari apa tujuan Indonesia untuk mengupayakan memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia serta bentuk instrumen atau aktivitas diplomasi pertahanan yang telah berjalan saat mengupayakan hal tersebut. Indonesia melihat perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 sebagai

implementasi kepentingan nasional dalam meraih kedaulatan teritorialnya. Selain itu, perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 merupakan bentuk lingkup pertahanan yang sudah sewajarnya harus diperjuangkan atas nama kepentingan nasional.

Bentuk instrumen diplomasi pertahanan yang dapat dilihat dalam perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 adalah forum diskusi, kehadiran Atase Pertahanan dalam perundingan serta institusi militer lain sebagai representatif aktor utama diplomasi pertahanan, adanya penulisan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 serta interaksi militer-sipil yang sinergis dengan tujuan utama mencapai kepentingan nasional negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Supriyatno, Makmur. 2016. *Pendirian Batas Darat Internasional antara Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan*. Jakarta: CV Makmur Cahaya Ilmu.

Sugiyono, P.D. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif – Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta

Jurnal

Muthanna, KA. 2011. “Military Diplomacy”. *Journal of Defence Studies*. Vol. 5. No. 1. Januari.

Tesis

Erika. 2014. “Status Tanjung Datu Sebagai Outstanding Boundary Problem Pada Perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia”. Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Lain-lain

Gindarsah, Iis. 2015. “Indonesia’s Defence Diplomacy Harnessing The Hedging Strategy Against Regional Uncertainties”. *RSIS Working Paper*.

Pedrasan, Rodon. 2016. “Introduction to Module Defence Diplomacy”. *Diplomasi Pertahanan*, Universitas Pertahanan Indonesia.

Supriyatno, Makmur. 2009. “Masalah Perbatasan Darat Internasional antara Republik Indonesia-Malaysia di Daerah Tanjung Datu Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat”. Forum Diskusi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

-----, 2009. “Informasi tentang Permasalahan Teknis OBP Garis Batas Internasional antara RI-Malaysia di Tanjung Datu (Camar Bulan)”. Forum Diskusi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Silva, A.R. 2015. “Defense Diplomacy: What are we talking about?” *Encontro Nacional da ABRI*.

Website

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*, dalam http://bnpp.go.id/document/produk_hukum/2015/perkaban/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahun_2015.pdf.

Du Plessis, Antonio. 2008. “Defence Diplomacy : Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa”, dalam <https://www.questia.com/library/journal/1G1-193140720/defence-diplomacy-conceptual-and-practical-dimensions>.

Kementerian Hukum dan HAM, *Berita Negara Republik Indonesia*, 2014, DITJENPP Kementerian Hukum dan HAM, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn403-2014.pdf>.

Your Article Library, “Diplomacy: Meaning, Nature, Functions and Role in Crisis Management”, dalam <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/diplomacy-meaning-nature-functions-and-role-in-crisis-management/48491>, diakses pada 16 November 2017.